

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rahmat Hi., Mutalib, Abdul. (2023), *Hukum Acara Pidana*, Selat Media Patners, Yogyakarta
- Harahap, Yahya. (2021), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hiariej, Eddy O.S. (2015), *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta
- Ilyas, Adam. (2023), *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Rajawali Pers, Depok
- Sofyan, Andi Muhammad. *et al.*, (2020,) *Hukum Acara Pidana Edisi Ketiga*, Prenada Media, Jakarta

JURNAL

- Apriyansyah, *et al.*, (2025), “*Study Atas Putusan No.254/PID.B/2017/PN LLG Kepemilikan Senjata Tajam Di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau*”, Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 15, No. 1, hlm. 88-97, DOI: <http://journals.usm.ac.id/index.php/humani>.
- Daeng M, *et al.*, (2023), “*Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara Oleh Jaksa (Penuntut Umum) Kepada Penyidik*.” Journal on Education, Vol. 5, No. 4, hlm. 11046-11052, DOI: <http://jonedu.org/index.php/joe>.
- Darmono dan Herdyanto, Edy. (2014), “*Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab*

Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 3, hlm. 29-39, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38869>.

Makamea, Ronal. (2018), “*Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik.*” *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 5, hlm. 151-158.

Romiyasi, et al., (2023) “*Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri.*” *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Vol. 8, No. 3, hlm. 1239-1247, DOI: <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25074>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78.

INTERNET

CMS Publik Kejaksaan Republik Indonesia, “Informasi Perkara Pidana Umum: Satuan Kerja-KN. Bangkalan”, <https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker>, diakses pada 7 Agustus 2025.

LAIN-LAIN

Diskusi dilakukan dengan Irwanto Bagus Setyadi Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan Kasubsi Prapenuntutan Seksi Pidana Umum di Ruang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, *Diskusi Pembuatan Berita Acara Pendapat Untuk Perkara An. Mustakim bin Muniyanto*, Bangkalan, 21 Maret 2025.

Dokumen Berita Acara Pendapat (P-24) Format P-18 No. Berkas Perkara: BP/56/III/RES.1.24./2025/SATRESKRIM, atas nama Mustakim bin Muniyanto, Bangkalan, 21 Maret 2025.

Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan, Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Umum.

Register Perkara Seksi Pidana Umum, Catatan Register Perkara, Data Perkara Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Periode Januari 2025 – Mei 2025 di Ruang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, 7 Mei 2025.

Wawancara dilakukan dengan Feby Dwiki Darmawan selaku Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan di Ruang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, *Pengertian masing-masing Unsur Formil dan Materiil*, pada tanggal 8 April 2025.

Wawancara dilakukan dengan Galih Adzaningjagad Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan di Ruang Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, *Alur Jalannya Berkas Perkara Secara Umum*, Bangkalan, 24 April 2025.

Wawancara dilakukan dengan Galih Adzaningjagad Calon Jaksa Kejaksaan Negeri Bangkalan di Ruangannya Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan, *Proses Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Nomor Berkas Perkara: BP/56/III/RES.1.24./2025/ SATRESKRIM*, Bangkalan, 24 April 2025.